

## Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir

Jusmani<sup>1</sup>, Edduar Hendri<sup>2</sup>, Tomi Bayu Kurniawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [jusmani@univpgri-palembang.ac.id](mailto:jusmani@univpgri-palembang.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [hendri\\_edduar@yahoo.com](mailto:hendri_edduar@yahoo.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [tomi300699@gmail.com](mailto:tomi300699@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research was conducted to analyze the application of government accounting standards to the quality of the presentation of financial statements in the economic section of the regional secretariat of Komering Ilir. This research was conducted at the regional secretariat of Ogan Komering Ilir. This research uses a qualitative approach and data collection is carried out through the observation method, documentation method and literature study method. In this research it is expected to provide information or knowledge about the effect of the application of government accounting standards on the quality of financial statement presentation in the economic and natural resources section of the regional secretariat ogan komering. ilir, as well as being input and reference for making decisions regarding government accounting standards on the quality of the presentation of financial statements. The results show that the application of SAP has a positive effect on the quality of the presentation of financial statements and has a close relationship, although some obstacles can still be found, but in general, the Regional Secretariat of the Economy, Ogan Komering Ilir, supports the implementation of the implementation of Government accounting standards (SAP).*

**Keywords:** Government Accounting Standards (SAP), Quality of Financial Statement Presentation

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada bagian perekonomian sekretariat daerah ogan komering ilir. Penelitian ini dilakukan di sekretariat daerah ogan komering ilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, metode dokumentasi dan metode studi pustaka. Dalam penelitian diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada bagian perekonomian dan sumber daya alam sekretariat daerah ogan komering ilir, serta menjadi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan dan memiliki hubungan yang erat, meskipun begitu masih dapat ditemukan beberapa kendala namun secara umum bagian Perekonomian sekretariat daerah Ogan Komering Ilir mendukung pelaksanaan penerapan Standar akuntansi Pemerintah (SAP).

**Kata Kunci :** Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

### A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem yang handal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah, untuk mencapai tujuan tersebut maka informasi dalam laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif yang relevan sehingga dapat diperbandingkan dan juga dapat dipahami.

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan



lembaga-lembaga yang tidak memiliki tujuan mencari laba. Akuntansi pemerintahan biasanya lebih menekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya, sebagaimana didalam akuntansi perusahaan, akuntansi pemerintahan juga terdapat unsur akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen (Deddi Noordiawan:2012:11).

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Sebagai salah satu bagian dari ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tidak akan lepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara.

Sebelum ditetapkan menjadi peraturan pemerintah, KSAP melalui pemerintah meminta pertimbangan BPK RI atas draf SAP. Komite konsultatif lalu mengusulkan draf final kepada presiden melalui menteri keuangan untuk dijadikan peraturan pemerintah. Setelah ditetapkan dengan peraturan pemerintah, selanjutnya SAP dipublikasikan dan didistribusikan kepada publik termasuk masyarakat, institusi, serta perwakilan organisasi. Selain itu, KSAP juga melakukan sosialisasi awal standar kepada para pengguna. Bentuk sosialisasi awal yang dilakukan dapat berupa seminar/diskusi dengan para pengguna program professional berkelanjutan, training of trainer (TOT), dan lain-lain.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang cukup besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya namun undang - undang tersebut telah dicabut dan telah diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Akan tetapi selain memiliki kewenangan, pemda juga memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap Pemerintahan Daerah

Sistem akuntansi pemerintah daerah pada tingkat pemerintah daerah diatur dalam Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengalami perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 yaitu pada pasal 232 yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu pedoman bagi pemerintah daerah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Pada hakekatnya dalam pemerintahan daerah belum dapat menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, karena belum sepenuhnya memahami penerapan standar akuntansi pemerintahan daerah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemda, seperti, pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja tidak terduga, transaksi – transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang.

Informasi yang kredibel adalah informasi yang dapat dipercaya yang dimana informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi resiko, dan Akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu tentang informasi terkait dengan pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian kinerja pemerintah dalam memeberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai mana keputusan pemerintah dapat dilakukan dengan melalui komunikasi dengan rakyat, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan suatu penyajian laporan keuangan dan menjadi solusi pemecahan masalah bagi pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri.

Standar akuntansi pemerintahan itu sendiri sangat diperlukan dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD dalam bentuk laporan keuangan.

Selain beberapa faktor teknis tersebut laporan keuangan akan lebih baik lagi apabila didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat diperdipertanggungjawabkan. Hal - hal tersebut lah yang dapat menunjang kualitas hasil laporan keuangan daerah dan hasil ini dapat membantu implementasikan sistem akuntansi dan sistem keuangan daerah guna memperlancar hasil laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya.

Begitupun pememerintah daerah Ogan Komering Ilir yang dituntut menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Setiap pelaporan keuangannya agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang berlaku, guna menghasilkan informasi yang dibutuhkan semua pihak.

Fenomena yang terjadi yaitu berdasarkan dari standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan di pemerintahan daerah Ogan Komering Ilir (OKI) masih belum dapat dilaksanakan secara optimal ini dikarenakan mungkin kurangnya sosialisasi tentang pemahaman standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di pemerintah daerah OKI.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **Pemerintahan daerah**

Pengertian pemerintan daerah berdasarkan Undang – Undang No.22 Tahun 1999 “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta yang lainnya. Pemerintah Daerah yang dimaksud disini adalah badan eksekutif”

Menurut undang – undang No. 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencabut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387).
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Menja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

- d. Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
- e. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan:

- a. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
- b. UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Undang-Undang.

### **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD (Deddi Noordiawan:2012).

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbunyi: “Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu, Standar Akuntansi Pemerintahan juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.

### **Basis Akrua**

SAP Berbasis Akrua yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan equitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Basis Akrual untuk neraca berarti asset, kewajiban, dan equitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. (PP No.71 tahun 2010).

## **Karakteristik, Tujuan, dan Ciri Khas, Akuntansi Pemerintahan**

### **1) Karakteristik Akuntansi Pemerintahan**

Beberapa Karakteristik Akuntansi Pemerintahan yang membedakan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi yang lainnya (Indra Bastian:2010) :

- a. Karena keinginan mengejar laba tidak inklusif didalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan.
- b. Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan.
- c. Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara lain tergantung pada sistem pemerintahannya.
- d. Karena fungsi akuntansi adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran, maka penyelenggaraan akuntansi pemerinthan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap – tiap negara.

### **2) Tujuan Akuntansi Pemerintahan**

Ada tiga tujuan pokok Akuntansi Pemerintahan antara lain (Deddi Noordiawan:2012) :

- a. **Pertanggungjawaban**  
Tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab , terkait kegiatan unit unit pemerintahan.
- b. **Manajerial**  
Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintahan.  
Tujuan manajerial ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintahan tingkat atas dan menengah dapat mengandalkan informasi keuangan atas pelaksanaan sebelumnya untuk membuat keputusan atau menyusun perencanaan masa yang akan datang.
- c. **Pengawasan**  
Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

### **3) Ciri Khas Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi Pemerintahan memiliki beberapa ciri khas sebagai berikut (Deddi Noordiawan:2012) :

- Investasi pada asset yang tidak menghasilkan pendapatan.



Pada umumnya pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat memerlukan investasi yang besar pada asset yang tidak menghasilkan pendapatan, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik lainnya.

- Tidak ada pengungkapan laba  
Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan pencapaian laba. Dalam sektor pemerintahan, tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak oleh masyarakat dengan jasa yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak akan terdapat laporan laba rugi yang mengungkapkan pencapaian sebuah laba.
- Tidak ada pengungkapan kepemilikan  
Pemerintah tidak mempunyai kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan, dan pemerintah tidak dimiliki oleh individu atau golongannya. Dengan demikian, tidak akan terdapat pernyataan atau pengungkapan yang menunjukkan kepemilikan suatu pihak seperti halnya ditunjukkan oleh bagian modal sebuah neraca perusahaan.
- Penggunaan Akuntansi Dana  
Dengan segala karakteristik yang melekat pada organisasinya, akuntansi lebih memandang pemerintah sebagai kesatuan dana dengan tujuan dan misi tertentu, tidak sebagai suatu entitas organisasi yang mempunyai kepemilikan hal ini memberikan implikasi pada penggunaan persamaan akuntansi yang tidak lagi menggunakan modal pemilik melainkan saldo dana.

### **Laporan Keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu entitas.

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini dalam satu periode tertentu. (Kasmir 2017:7).

Laporan keuangan adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur - unsur laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. (Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Selatan 2015:394).

Laporan keuangan pemerintah memiliki tujuan menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan yang terdapat dalam satu set Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports), dan Laporan Finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Laporan Perubahan Saldo
- c) Neraca
- d) Laporan Operasional
- e) Laporan Arus Kas
- f) Laporan Perubahan Ekuitas
- g) Catatan atas Laporan Keuangan

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

Laporan keuangan merupakan alat yang menunjukkan kinerja dari Kepala Daerah untuk bertanggungjawab atas wewenang yang telah diberikan kepadanya dalam mengelola organisasi yang ada di bawah kepemimpinannya. Menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut memiliki Karakteristik yang andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik dilihat dari segi yang tidak tidak berwujud.

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan SAP hanya berlaku untuk laporan keuangan dan bukan untuk informasi lainnya yang disajikan dalam suatu laporan tahunan. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan harus dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dan informasi lainnya yang bukan merupakan subjek yang diatur dalam pernyataan standar ini. Karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

### **Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrua**

Pemerintah Reformasi proses akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrual tidaklah mudah. Ada hal yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksana (SDM) yang familiar dengan kebijakan lama tidaklah mudah. Namun mengingat akuntansi berbasis akrual merupakan suatu keharusan, agar informasi yang disajikan dapat disajikan dengan secara akuntabel dan transparan. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Standar Akuntansi berbasis akrual dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Perubahan dari akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi akrual penuh membawa pengaruh terhadap pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarannya informasi operasi atau kegiatan. Dalam akuntansi gambaran perkembangan operasi atau kegiatan dibuat dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus atau defisit. Dengan ditetapkannya PP No. 71 tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual telah memiliki landasan hukum.

Terbitnya Permendagri 64 Tahun 2013 semakin memperjelas model akuntansi



berbasis akrual yang diterapkan mulai tahun 2015. Yang berarti bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk segera menerapkan SAP berbasis akrual. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 tidak banyak berbeda, keberadaan pos piutang, Aset Tetap, Hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Perbedaan PP No. 71 Tahun 2010 dengan PP No. 24 Tahun 2005, terkait dengan komponen laporan keuangan.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa data yang dinyatakan dalam angka dan dapat dihitung dengan rumus statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pemda OKI. Sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pemda OKI pada tahun 2019.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian, serta dokumen yang diteliti dapat berbagai jenis dan tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, dan dokumen-dokumen lainnya.

Analisis data dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi, data akan menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah - masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Data yang akan dianalisis merupakan data hasil pendekatan survey penelitian dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian dilakukan analisa untuk menarik kesimpulan.

### D. HASIL PENELITIAN

**Tabel Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir**

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019

(Dalam rupiah)

URAIAN	Catan	Tahun anggaran 2019			Tahun Anggaran 2018 Realisasi
		Anggaran	Realisasi	% Realiasi Thd Anggaran	
<b>A Pendapatan Negara Dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
-Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0,00	74.318.678,00	-	<b>125.825.929,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>0,00</b>	<b>74.318.678,00</b>	-	<b>125.825.929,00</b>
<b>B BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
-Belanja pegawai	B.2.1	36.108.550.000,00	34.785.601.664,00	<b>96,34</b>	<b>31.846.652.389,00</b>
-Belanja Barang	B.2.2	9.468.085.000,00	9.468.010.295,00	<b>95,32</b>	<b>9.787.138.044,00</b>
-Belanja Modal	B.2.3	1.428.100.000,00	1.344.587.000,00	<b>94,15</b>	<b>646.883.450,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>47.469.735.000,00</b>	<b>45.598.198.959,00</b>	<b>96,06</b>	<b>42.280.673.883,00</b>

Berdasarkan laporan realisasi anggaran sekretariat daerah ogan komering ilir di atas dapat diketahui bahwa penerimaan negara bukan pajak tahun 2019 adalah sebesar Rp.74.318.678,00 dan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 125.825.929,00 dan anggaran beanja tahun 2019 adalah sebesar Rp. 47.469.735.000,00 dan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.42.280.673.883,00 dan terealisasi sebesar 96,06% pada tahun 2019.

**Tabel Neraca**  
**Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir**  
Neraca Per 31 Desember 2019 dan Desember 2018  
(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	<b>C.1</b>		
- Persediaan	C.1.2	386.410.178,00	478.343.672,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>386.410.178,00</b>	<b>478.343.672,00</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>C.2</b>		
- Tanah	C.2.1	12.039.226.774,00	12.039.226.774,00
- Peralatan dan Mesin	C.2.2	6.614.997.481,00	5.873.191.481,00
- Gedung dan Bangunan	C.2.3	11.728.659.400,00	11.125.878.400,00
- Aset Tetap Lainnya	C.2.4	149.213.094,00	149.213.094,00
- Akumulasi Penyusutan	C.2.5	(8.574.227.199,00)	(7.414.651.964,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>21.957.869.550,00</b>	<b>21.772.857.785,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>C.3</b>		
- Aset Tetap Lainnya	C.3.1	55.403.689,00	55.403.689,00
- Akumulasi Penyusutan	C.3.2	0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>55.403.689,00</b>	<b>55.403.689,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>22.399.683.417,00</b>	<b>22.306.605.146,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>C.4</b>		
- Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	46.150.141,00	39.424.960,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>46.150.141,00</b>	<b>39.424.960,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>46.150.141,00</b>	<b>39.424.960,00</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>C.5</b>		
- Ekuitas Dana Lancar	C.5.1	-	438.918.712,00
- Ekuitas Dana Investasi	C.5.2	-	21.828.261.471,00
- Ekuitas	C.5.3	22.353.533.276,00	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>22.399.683.417,00</b>	<b>22.306.605.146,00</b>

Berdasarkan neraca diatas dapat diketahui bahwa jumlah Asset pada tahun 2019 di sekretariat daerah ogan komering ilir adalah sebesar Rp. 22.399.683.417,00 dan jumlah Asset pada tahun 2018 adalah Rp. 22.306.605.146,00 serta Jumlah Kewajian Dan Equitas Dana pada tahun 2019 adalah Rp. 22.399.683.417,00 dan



pada Tahun 2018 adalah Rp. 22.306.605.146,00

**Tabel Laporan Operasional**  
**Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir**  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	D.1	
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	D.1.1	
- Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	30.526.342,00
Jumlah Pendapatan Operasional	D.1.1	30.526.342,00
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	D.1.2	
- Beban Pegawai	D.1.2.1	34.789.604.121,00
- Beban Persediaan	D.1.2.2	396.985.836,00
- Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	1.440.049.352,00
- Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	917.151.743,00
- Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	6.810.709.124,00
- Beban Penyusutan Dan Amortisasi	D.1.2.6	1.159.575.235,00
<b>Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d D.1.2.6)</b>	D.1.2	45.483.549.069,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1 – D.1.2)	D1	(45.483.549.069,00)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.2	
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>	D.2.1	
- Pendapatan dari Kegiatan Lainnya	D.2.1.1	43.792.336,00
- Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1.2	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.1.1 – D.2.1.2)	D.2.1	43.792.336,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	D.2	43.792.336,00
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO (D.1 + D.2)</b>		(45.439.756.733,00)

Dari laporan operasional tersebut jumlah beban operasional sekretariat daerah Ogan Komering lir pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 45. 483.549.069,00 dan pendapatan dari kegiatan lainnya adalah sebesar Rp. 43.792.336,00

**Tabel Laporan Perubahan Ekuitas**  
**Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir**  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	<b>22.267.180.186,00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) –LO</b>	E.2	<b>(45.439.756.733,00)</b>
<b>PENYESUAIAN TAHUN BERJALAN</b>	E.3	
- Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	2.229.542,00
<b>Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan</b>		<b>2.229.542,00</b>
<b>DAMPAK MUKULATIF PERUBAHAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.4	0,00
- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	0,00
Jumlah data Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar		0,00
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.5	45.523.880.281,00

<b>KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2 + E.3 + E.5)</b>		<b>86.353.090,00</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6</b>	<b>22.353.090,00</b>

Dari laporan perubahan ekuitas sekretariat daerah ogan komering ilir tahun 2019 dapat diketahui bahwa equitas awal adalah sebesar Rp. 22.267.180.186,00 dan equitas akhir adalah Rp. 22.353.090,00 dan kenaikanequitas adalah sebesar Rp. 86.353.090,00.

## **E. PEMBAHASAN**

### **1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir serta seluruh satu kerja yang berada di dalamnya telah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Walaupun penerapan SAP Berbasis akrual pada Bagian perekonomian dan Sumber Daya Alam proses yang dilaksanakan belum berjalan secara sempurna karena masih dalam tahap penyesuaian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar prosedur penyusunan laporan keuangan yang sedang dilakukan oleh satuan kerja telah sesuai dengan petunjuk teknis. Hal ini dikarenakan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan dengan bantuan aplikasi komputer berbasis akrual. Meskipun demikian, ditemukan bahwa pengakuan dan pencatatan terhadap beberapa pos akrual belum dilakukan sehingga laporan keuangan pada waktu-waktu tertentu belum dapat menghasilkan informasi berkualitas yang diharapkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Endah Basinah Lauma (2016) berjudul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Asset tetap pemerintah Daerah Kabupaten Mongondow menunjukkan bahwa meskipun kabupaten bolaang mongondow telah menerapkan SAP berbasis Akrual pada asset tetap ini berdasarkan (PP 71/2010) ditemukan beberapa kendala seperti perbedaan dalam pencatatan asset tersebut antara divisi akuntansi dan devisi aset ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Terkautit perbedaan hasil penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya disebabkan karena setiap daerah memiliki tingkat kesiapan yang berbeda-beda. Hal ini tentu saja mempengaruhi tingkat kesiapan dan kepatuhan untuk menerapkan peraturan tersebut. Selanjutnya menunjukkan bahwa, masih mengalami banyak hambatan dalam proses penerapan SAP Berbasis Akrual.

Meskipun telah melakukan penerapan SAP Berbasis Akrual ini masih dapat ditemukan beberapa kendala atau Hambatan yang dialami oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada umumnya serupa dengan hambatan yang dialami oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Hambatan - hambatan tersebut antara lain yakni ketidaksesuaian latar belakang pendidikan, kurangnya pemahaman pengelola keuangan terhadap basis akrual, serta pengelolaan aset yang masih belum berjalan.

Terkait ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pengelola keuangan, hal ini disebabkan pelaksanaan proses akuntansi hanya menggunakan SAP berbasis kas yang pada dasarnya mudah dipahami dan dapat dikerjakan oleh SDM yang bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi sekalipun. Di sisi lain, SAP berbasis akrual memiliki prosedur dan tahapan yang lebih kompleks sehingga dibutuhkan



pemahaman yang lebih mendalam dari pengelola keuangan atau penyusun laporan keuangan.

Penggunaan berbagai software pembantu dalam proses penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan kendala Sumber Daya Manusia (SDM) masih merupakan kendala klasik yang dialami oleh semua Pemda. Oleh sebab itu, penggunaan software pembantu ini dinilai merupakan solusi untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan penerapan SAP Berbasis Akrua disamping pembelajaran dan pelatihan yang dilakukan secara terus menerus.

## 2) Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan tabel laporan keuangan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir menghasilkan empat komponen laporan keuangan. Keempat komponen laporan keuangan tersebut adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari dua jenis, yakni laporan finansial yang berbasis akrua dan laporan realisasi anggaran yang berbasis kas. Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, laporan finansial disajikan satu kali dalam setahun atau penyajiannya adalah tahunan. Sedangkan, laporan realisasi anggaran disajikan empat kali dalam setahun, dimana penyajiannya adalah per triwulan.

Sistem akuntansi bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir dijalankan secara terkomputerisasi. Setiap harinya selalu ada pengelola keuangan dari satuan kerja yang datang, baik itu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara, maupun penanggungjawab lain yang terkait. Hal ini diketahui bahwa alasan pengerjaan ini dilakukan adalah karena koneksi internet di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan sangat lambat sehingga tidak dapat mengakses aplikasi.

Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu mengentri transaksi - transaksi akuntansi ke dalam aplikasi sehingga aplikasi tersebut secara otomatis akan menjurnal, memposting, dan membentuk laporan keuangan.

Secara umum, jurnal - jurnal yang telah dicatat oleh satuan-satuan kerja telah sesuai dengan petunjuk teknis. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam penomoran akun pada buku jurnal yang telah dicatat oleh satuan kerja.

Meskipun telah melakukan penerapan SAP Berbasis Akrua ini masih ditemukan berbagai masalah dan kendala namun secara umum Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaannya baik melalui dukungan pemimpin, dukungan antar entitas, pemberian sarana dan pra sarana pendukung, dan pemberian pelatihan.

## 3) Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

Dari analisis yang diungkapkan dari laporan keuangan di atas dapat diambil garis besarnya bahwa Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir telah melakukan persiapan - persiapan dan strategi yang matang sehingga tercipta keberhasilan dalam mengimplementasi Basis Akrua dengan baik. Jadi, dapat dikatakan bahwa peraturan pemerintah apa yang berlaku

saat ini maka peraturan tersebut yang akan diikuti oleh pemerintah daerah khususnya Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir.

Hal ini merupakan contoh yang baik yang dapat dilihat dari sektor publik, bahwa setiap ada perubahan peraturan maka pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh pemerintah pusat wajib melaksanakan peraturan baru tersebut karena adanya nilai kepatuhan terhadap hukum. Nilai kepatuhan terhadap hukum tersebut mendorong tindakan pemerintah untuk senantiasa mengikuti aturan main dari standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku saat ini yaitu SAP berbasis akrual.

Dalam penyajian laporan keuangan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir untuk hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis Akrual, maka Laporan Keuangan disusun berdasarkan basis Akrual, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh Entitas Pelaporan serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

Hal ini ditujukan agar lebih memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan dan mengevaluasi efektifitas. Dengan demikian diyakini akan dicapainya laporan keuangan yang lebih terstruktur dan sistematis, ini akan lebih memudahkan pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, dan dapat membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.

## **F. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1) Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya Laporan Keuangan yang dihasilkan pada akhir tahun (khususnya Tahun Anggaran 2019) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dimana format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan secara tepat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Meskipun telah melakukan penerapan SAP Berbasis Akrual ini masih ditemukan berbagai masalah dan kendala namun secara umum Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaannya baik melalui dukungan pemimpin, dukungan antar entitas, pemberian sarana dan pra sarana pendukung, dan pemberian pelatihan. Standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis Akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta memiliki hubungan yang erat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila standar Akuntansi pemerintahan dapat diterapkan dengan baik maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dapat dihasilkan oleh pemerintah daerah.

### **2) Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengajukan beberapa saran yang bisa dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia yang lebih kompeten pada bidang akuntansi pemerintah daerah agar pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan lebih baik.
2. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan disarankan agar membuat jadwal



dalam proses penyusunan secara berkala dan dilakukan pengawasan agar laporan keuangan tersebut lebih terstruktur dan sistematis.

3. Perlunya meningkatkan kualitas kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan kompetensi sumber daya yang dimiliki, agar staf tersebut dapat lebih memahami mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Karena masih ada staf yang kelulusannya diluar akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan (Edisi Satu), Cetakan Kesepuluh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lauma, Endah Basida. (2016). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (online)*. (<https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses pada 31 maret 2020.)
- Nordiawan, Deddi. (2012). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun IAI Sumsel. (2015). *Pengantar Akuntansi*. Sumatera Selatan: CV. Rariz Grafika (Perc. Bunda).